



ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI

Gusni Nelvia Fitri

Universitas Terbuka

018888757@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi serta dokumentasi laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran mencapai 94,23% dari total anggaran. Kendala yang dihadapi antara lain masih minimnya keikutsertaan pengelola keuangan dalam pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) keuangan dan akuntansi serta perlunya penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikannya.

Kata Kunci: Pencatatan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Pendidikan, Akuntansi Sektor Publik

Abstract

This study aims to analyze the financial recording and reporting at the Department of Education and Culture of Bukittinggi City for the 2017 Fiscal Year and to identify the obstacles faced in the process. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through direct interviews with the Finance Subdivision of the Department of Education and Culture of Bukittinggi City and documentation of financial reports including the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Equity Change Report, and Notes to Financial Statements. The results show that the Department of Education and Culture of Bukittinggi City has prepared and presented its financial reports in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) and Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 concerning the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Local Government. The budget realization reached 94.23% of the total budget. The obstacles encountered include the lack of participation of financial managers in financial and accounting training or technical guidance and the need to place employees according to their field of expertise and educational background.

Keywords: *Financial Recording, Financial Reporting, Government Accounting Standards, Department of Education, Public Sector Accounting*

PENDAHULUAN

Instansi Pemerintah secara umum berperan dalam pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing baik di tingkat pusat, daerah, kota serta kabupaten. Misalnya lembaga pendidikan formal, dapertemen, rumah sakit serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di daerah maupun kota. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan, instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan



dan Belanja Negara. Pendapatan dalam APBN bersumber dari penerimaan pajak (pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional), penerimaan bukan pajak (dari Sumber Daya Alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, dan pendapatan bukan pajak lainnya), serta penerimaan hibah. Sumber penerimaan tersebut berasal dari masyarakat sehingga sudah seharusnya pemerintah mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Awalnya, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa "penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah". Pada tahun 2004 terbit Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, standar



akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Perbaharuan Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi telah menyusun Laporan Keuangan dengan baik sesuai (dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai acuan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan tersebut?.

c. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2017.

d. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi telah melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dengan baik sesuai (No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai acuan,



2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan tersebut.

METODELOGI PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 9 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan untuk menganalisa adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan sebenarnya. Untuk menganalisa data yang diteliti penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang diperoleh berupa dokumen catatan dan laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bukittinggi. Menurut Strauss dan Corbin (1998) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan wawancara langsung yang dilakukan kepada sub. bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Data Primer ini bertujuan untuk mengetahui informasi apakah Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

- Laporan Perubahan Ekuitas,
- Laporan Posisi Keuangan / Neraca,
- Laporan Realisasi Anggaran,
- Laporan Operasional
- Data Aparatur Sipil negara (ASN) dan Karyawan, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun 2017

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis

Analisis data yang dipakai adalah pendekatan deskriptif, yakni analisis dengan membandingkan teori dengan kenyataan atau praktek tentang kesesuaian pelaporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Analisis deskriptif ini memberikan gambaran



secara menyeluruh tentang Pelaporan Keuangan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi telah sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.
3. Penyajian Data Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan.

Analisis Terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Proses akuntansi keuangan daerah umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongan dan tahap pelaporan. Di setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi yang dibantu oleh software yang disebut SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dimana sistem pencatatannya masih berbasis kas dan untuk pelaporannya berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Bukittinggi menyajikan 5 (Lima) laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pembahasan

- Laporan Realisasi Anggaran

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran tersebut disajikan dalam 2 versi yaitu : LRA yang mengelompokkan kode rekeningnya sesuai dengan permendagri nomor 13 Tahun 2006 (Berbasis Kas) dan LRA yang mengelompokkan kode rekeningnya sesuai dengan permendagri no 64 tahun tahun 2013 (Berbasis Akrual). Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi terdiri dari, Belanja Operasi, Belanja Modal dan Surplus / Defisit.

Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, tidak menyajikan akun pendapatan, dikarenakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tidak mendapatkan pendapatan dari pajak daerah maupun retribusi daerah secara langsung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberikan anggaran langsung oleh Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk belanja Operasi dan belanja modal saja.



Berdasarkan dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa Anggaran yang terealisasi sebesar 94,23% dari total anggaran, hal ini terjadi akibat dari ada kegiatan yang tidak terealisasi dan efisiensi belanja. Sehingga anggaran yang diberikan pemerintahan tidak dapat terealisasi sebesar 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sudah dapat dikatakan relevan informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Laporan yang diterbitkan harus andal dan disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral, serta dapat dibandingkan dengan laporan lainnya. Dari laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

- Laporan Posisi Keuangan /Neraca

Laporan posisi keuangan/neraca memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas. Dalam neraca akan tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas tersebut yang tersaji pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2013 penyusunan neraca sebagai salah satu komponen laporan keuangan pemerintah. Dimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (2010) bahwa basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dari laporan neraca yang disajikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

- Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.



3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sudah menyajikan Laporan Operasional sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan diperjelas dengan Permendagri No.64 Tahun 2013.

- Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk satu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sudah menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Catatan Atas Laporan Keuangan menjelaskan tentang laporan keuangan secara narasi agar dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan yang bersangkutan.

3. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN/ Karyawan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sebanyak 113 orang, Tingkat Pendidikan ASN/ Karyawan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi beragam, mulai dari tamatan SMA sampai dengan S2. Walaupun latar belakang pendidikan yang berbeda, namun kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah baik, dikarenakan ASN/ Karyawan mempunyai skil dan pengalaman kerja yang cukup lama.

Untuk Pengelola keuangan (ASN/ Karyawan) pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada dasarnya sudah memahami tugas pokok fungsi sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan baik. Pengelola Keuangan juga mengetahui dan memahami peraturan- peraturan keuangan yang terkait dengan laporan keuangan, Pengelola Keuangan memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan sistem, mengikuti dan menguasai perkembangan aplikasi yang ada. Namun Pengelola Keuangan jarang mengikuti Pelatihan-pelatihan atau Bimtek keuangan dan akuntansi dalam meningkatkan kemampuan bekerja, serta diperlukan menempatkan pegawai sesuai dengan bidang dan latar Pendidikannya.



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan tersebut sudah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi telah mencatat dan menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasil Akrual pada Pemerintah Daerah
2. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Karena setiap pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan serta hasil yang dicapai secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingannya.
3. Kualitas Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah baik, dikarenakan ASN/ Karyawan mempunyai skil dan pengalaman kerja yang cukup lama. Untuk kedepannya diharapkan ASN Pengelola Keuangan lebih sering mengikuti bimtek dan pelatihan untuk peningkatan kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajat. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta. UPP-AMP YKPN.
- Bastian, Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Situmorang, D. M. (2019). the Effect of Taxpayer Awareness and Fiskus Service on Performance of Tax Revenue With Taxpayer Compliance As Intervening Variables. *Management and Sustainable Development Journal*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.46229/msdj.v1i1.98>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasil Akrual pada Pemerintah Daerah*